

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, edisi revisi, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Arie Cahyono et al., 2023, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS
https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/migrasi-datapublikasi/file/Policy_Paper/Buku%20Saku%20SPA%202023.pdf.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 898.
- Fransiska Novita Eleonora et al., 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Cetakan ke-1, edisi pertama, Jakarta: Madza Media.
http://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku%20Ajar%20Hukum%20Perlindungan%20Anak%20dan%20Perempuan_removed_compressed.pdf.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, edisi pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, edisi pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- L. Ridwan H.R., 2016, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim HS, dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL :

Jean K. Matuankotta, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak”, *Jurnal Sasi*, No.3.

Lenia Indri Safitri, Siti Ina Savira, 2022, “Harapan Pada Perempuan yang Belum Memiliki Anak”, *Penelitian Psikologi*, No. 9.

Lin Karita Sakharina et al., 2018, “Konvensi Hak Anak Sebagai Instrumen Penanganan Anak-Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi”, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, No. 2.

M. Sholehuddin, et al., 2023, “Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak dalam Pengasuhan”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, No. 3.

Rini Safarianingsih, 2022, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan”, *Perahu (Penerangan Hukum)*, No. 10.

Rochxy dan Bayu Lesmana, 2013, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama”, *Jurnal Yudisial*, No. 6.

Teddy Prima Anggriawan, 2021, “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Kajian dan Penelitian Hukum*, No. 3.

SKRIPSI :

Gaby Notarisa, 2017, “Akibat Hukum Bagi Anak Angkat yang Orang Tua Angkatnya Belum Memberitahukan Asal-Usul Orang Tua Kandung Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kecamatan Pontianak Kota”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (tidak diterbitkan).

Rusmini, 2021, “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama”, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Kandungan (tidak diterbitkan).

Sri Mulyani Muzakkir, 2021, “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak Antar Warganegara Indonesia Secara Langsung di Kota Makassar”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (tidak diterbitkan).

THESIS :

Novi Kartiningrum, 2008, "Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)", Thesis: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (tidak diterbitkan).

INTERNET :

Internet, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring*.
url: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>.

Internet, Tingkatkan Pemahaman Masyarakat dan Perangkat Desa Terkait Peraturan Hukum Pengangkatan Anak DINSOSPMD Lakukan Penyuluhan Sosial, 2024, *Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
<https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/tingkatkan-pemahaman-masyarakat-dan-perangkat-desaterkait-peraturan-hukum-pengangkatan-anak>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

RI, Undang-Undang Dasar 1945

RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

RI, Konvensi tentang Hak-Hak Anak

RI, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

RI, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

RI, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

RI, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang*

RI, Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah*

RI, Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang*

